



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
PANITIA SELEKSI TERBUKA JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2017
JL. MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16 JAKARTA 10110
KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520338
LAMAN www.ropeg.kkp.go.id

Nomor : 30/PANSEL-JPT/PRATAMA/XI/2017
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Pengumuman Seleksi Terbuka Jabatan
Pimpinan Tinggi Pratama setara Eselon II ✓

3 November 2017

Yth. Sekretaris Kementerian/ Sekretaris Jenderal/ Sekretaris Utama/ Sekretaris Daerah ✓
Provinsi
di
tempat

Dalam rangka pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama setara eselon II di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2017 sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, disampaikan bahwa Kementerian Kelautan dan Perikanan akan melakukan Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama setara eselon II yang dapat diikuti oleh PNS Kementerian/Lembaga/Pemerintahan Daerah/Perguruan Tinggi Negeri terakreditasi A yang memenuhi persyaratan.

Untuk informasi lebih lengkap dapat dilihat pada laman <http://ropeg.kkp.go.id> dan <http://selter.kkp.go.id/seleksijpt/>. Berkenaan dengan hal tersebut, kami mengharapkan Bapak/Ibu dapat menginformasikan pengumuman dimaksud kepada seluruh pegawai di lingkungan instansi Bapak/Ibu.

Demikian disampaikan, atas perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

a.n. Ketua Panitia Seleksi JPT Pratama
Kepala Biro SDM Aparatur
Selaku Sekretaris Panitia Seleksi,

[Signature]
Supranawa Yusuf

Tembusan:
1. Menteri PAN dan RB
2. Ketua Komisi ASN
3. Sekretaris Jenderal KKP

0023808

08 NOV 2017

SEKRETARIS

Kementerian/Lembaga:

1. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
2. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
4. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya
5. Kementerian Dalam Negeri;
6. Kementerian Luar Negeri;
7. Kementerian Pertahanan;
8. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
9. Kementerian Keuangan;
10. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
11. Kementerian Perindustrian;
12. Kementerian Perdagangan;
13. Kementerian Pertanian;
14. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
15. Kementerian Perhubungan;
16. Kementerian Ketenagakerjaan;
17. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
18. Kementerian Kesehatan;
19. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
20. Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
21. Kementerian Sosial;
22. Kementerian Agama;
23. Kementerian Komunikasi dan Informatika;
24. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
25. Kementerian Agraria dan Tata Ruang;
26. Kementerian Sekretariat Negara;
27. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
28. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
29. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
30. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;

31. Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
32. Kementerian Pemuda dan Olahraga;
33. Kementerian Pariwisata;
34. Badan Pemeriksa Keuangan;
35. Kejaksaan Agung;
36. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
37. Badan Kepegawaian Negara;
38. Sekretariat Kabinet.

Provinsi:

1. Provinsi Aceh;
2. Provinsi Sumatera Utara;
3. Provinsi Sumatera Barat;
4. Provinsi Riau;
5. Provinsi Jambi;
6. Provinsi Sumatera Selatan;
7. Provinsi Bengkulu;
8. Provinsi Lampung;
9. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
10. Provinsi Kepulauan Riau;
11. Provinsi DKI Jakarta;
12. Provinsi Jawa Barat;
13. Provinsi Jawa Tengah;
14. Provinsi DI Yogyakarta;
15. Provinsi Jawa Timur;
16. Provinsi Banten;
17. Provinsi Bali;
18. Provinsi Nusa Tenggara Barat;
19. Provinsi Nusa Tenggara Timur;
20. Provinsi Kalimantan Barat;
21. Provinsi Kalimantan Tengah;
22. Provinsi Kalimantan Selatan;
23. Provinsi Kalimantan Timur;
24. Provinsi Kalimantan Utara;
25. Provinsi Sulawesi Utara;
26. Provinsi Sulawesi Tengah;
27. Provinsi Sulawesi Selatan;
28. Provinsi Sulawesi Tenggara;
29. Provinsi Gorontalo;
30. Provinsi Sulawesi Barat;

31. Provinsi Maluku;

32. Provinsi Maluku Utara;

33. Provinsi Papua;

34. Provinsi Papua Barat.